BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi banyak negara, terutama negara sedang berkembang seperti Indonesia. Negara sedang berkembang pada umumnya, penduduknya memiliki pendapatan yang rendah dan produktivitasnya rendah. Hal ini merupakan salah satu dari beberapa penyebab kemiskinan yang terjadi di Negara sedang berkembang.

Sebagaimana yang disampaikan Todaro, menyatakan bahwa variasi kemiskinan di negara berkembang disebebakan oleh beberapa faktor yaitu: (1) Perbedaan geografis, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan, (2) Perbedaan sejarah, sebagian dijajah oleh negara yang berlainan, (3) Perbedaan kekayaan sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusianya, (4) Perbedaan peranan sektor swasta dan negara, (5) Perbedaan struktur industri, (6) Perbedaan derajat ketergantungan pada kekuatan ekonomi dan politik negara

lain dan (7) Perbedaan pembagian kekuasaan, struktur politik dan kelembagaan dalam negeri.[1]

Menurut Bank Dunia salah satu penyebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan dan tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima. Disamping itu, kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang dikategorikan miskin tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), serta tingkat pendidikan dan kesehatan mereka pada umumnya tidak memadai.[2]

Kemiskinan akan menghambat produktivitas individu dan masyarakat dengan keterbatasan biaya, kesulitan memperoleh pendidikan, kesehatan, pengangguran dan kebutuhan hidup layak. Oleh karena itu, permasalahan kemiskinan ini menjadi masalah yang sangat serius serta memerlukan peran penting dari berbagai pihak dalam membantu pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan.

---

[1] Budi Made Kembar Sri, "Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Bali: Analisis FEM Data Panel", *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan* Vol. 6, No. 1, (Februari, 2013) Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, h. 3.

[2] Syahrur Romi dan Etik Umiyati, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan di Kota Jambi", *e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, Vol. 7, No. 1, (Januari-April, 2018) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, h. 2.

Kemiskinan melekat di negara-negara berkembang seperti Indonesia dan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, angka kemiskinan ini harus dikurangi jumlahnya.

Salah satu faktor penentu keberhasilan pemerintah dalam menciptakan pembangunan nasional adalah menurunkan angka kemiskinan di negara ini. Tujuan utama dalam strategi instrumen pembangunan adalah menurunkan angka kemiskinan nasional, hal ini membuktikan bahwa titik berat pembangunan nasional adalah efektifitas dalam menurunkan jumlah penuduk miskin secara keseluruhan.[3] Presentase penduduk miskin Provinsi Banten tahun 2011-2019 dapat dilihat pada grafik 1.1 dibawah ini:

Grafik 1.1

Grafik Presentase (%) Penduduk Miskin di Provinsi Banten

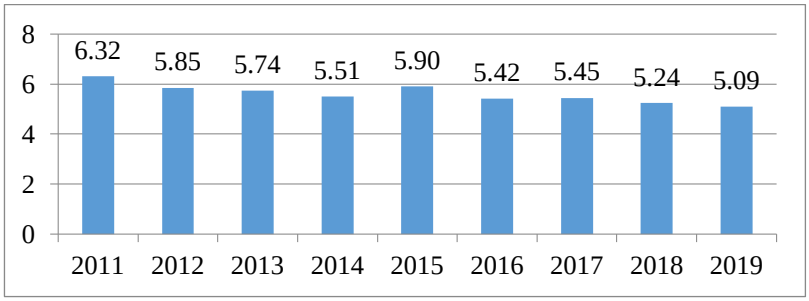

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten

[3] Khairil Ihsan dan Ikhsan, "Analisis Pengaruh UMP, Inflasi dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) Ekonomi Pembangunan*, Vol. 3, No. 3, (Agustus, 2018) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, h. 153.

Berdasarkan grafik 1.1 tersebut, kemiskinan di Provinsi Banten fluktuatif. Pada tahun 2011, presentase penduduk miskin sebesar 6.32, hingga tahun 2014 presentase penduduk miskin menurun sebesar 5.51. Namun, tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 5,90 persen, kemudian pada tahun 2016 menurun sebesar 5,42 persen, dan pada tahun 2017 kembali meningkat sebesar 5.45 persen, hingga tahun 2019 presentase penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 5.09 persen.

Kualitas sumber daya manusia juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya penduduk miskin. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari indeks kualitas hidup/indeks pembangunan manusia. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk.[4]

Sumber daya manusia yang berkualitas bagi negara sedang berkembang seperti halnya Indonesia, merupakan faktor penting dalam upaya untuk mengejar ketertinggalan pembangunan dengan negara lain. Era informasi dan teknologi yang berkembang

[4] Syarifullah dan Tia Ratu Gandasari, "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten", *Jurnal Ilmu Ekonomi* Vol. 6, No. 2, (Oktober, 2016) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, h. 240.

dewasa ini semakin membuktikan bahwa penguasaan teknologi yang baik akan berdampak pada kualitas maupun kuantitas pembangunan itu sendiri. Agar teknologi dapat dikuasai, maka dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas.[5] Kualitas sumber daya manusia di Provinsi Banten ditunjukkan melalui nilai IPM yang relatif meningkat seperti terlihat dalam grafik 2.1 di bawah ini:.

Grafik 2.1

Grafik Presentase (%) IPM di Provinsi Banten

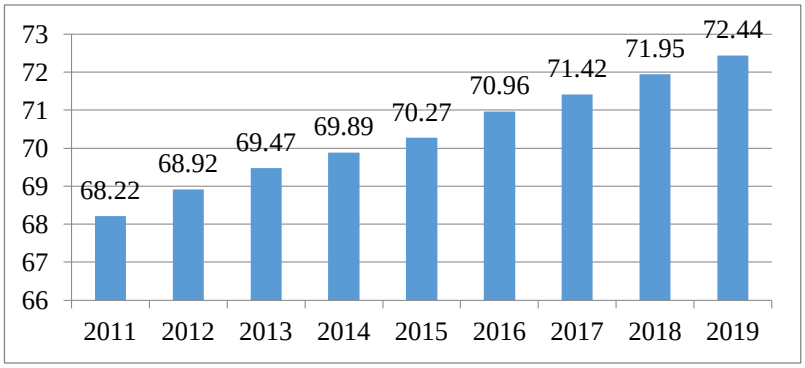

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten

Berdasarkan grafik 2.1 tersebut, IPM Provinsi Banten tahun 2011-2019 meningkat secara signifikan. Tahun 2011 IPM Provinsi Banten sebesar 68,22 persen, kemudian tahun 2012-2014 nilai IPM terus meningkat hingga tahun 2015 IPM Provinsi

[5] Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Jakarta: KENCANA, 2017), Cetakan ke-2, h. 164.

Banten sudah mencapai 70,27 persen dan pada tahun 2019 IPM Provinsi Banten meningkat sebesar 72.44 persen.

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak.[6]

Meskipun konsep IPM ini belum menggambarkan kondisi SDM yang ideal, apalagi aspek spiritualitas tidak dimasukkan dalam perhitungannya, namun konsep inilah yang saat ini tersedia dan disepakati untuk digunakan sebagai perbandingan level pembangunan SDM antar negara di dunia. Juga dapat dilihat bagaimana tren pembangunan SDM di berbagai negara di seluruh dunia.[7]

Selain IPM, faktor yang dapat mempengaruhi kemiskinan adalah upah minimum. Berdasarkan Peraturan

---

[6] Provinsi Banten Dalam Angka 2017, h. 95.

[7] Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), Cetakan ke-2, h. 148-149.

Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per-1/Men/1999, upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Kebijakan penetapan upah minimum oleh pemerintah adalah kebijakan yang diterapkan dengan tujuan sebagai jaring pengaman terhadap pekerja atau buruh agar tidak dieksploitasi dalam bekerja dan mendapat upah yang dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum (KHM).[8]

Kebijakan untuk meningkatkan upah minimum di suatu daerah akan berdampak terhadap peningkatan upah rata-rata buruh di daerah tersebut. Penentuan upah berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan adanya ketimpangan antara pekerja terampil dan tidak terampil. Kebijakan upah minimum menghasilkan efek positif dalam mengurangi kesenjangan upah yang terjadi di pasar tenaga kerja.[9]

Peningkatan upah minimum ini atas dasar kebijakan pemerintah daerah yang diberlakukan guna memicu minat

---

[8] Sudirman dan Lili Andriani, "Pengaruh Upah Minimum dan Inflasi Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jambi", *Jurnal of Ecomomics and Business* Vol. 1, No. 1, (September, 2017) Faklultas Ekonomi Universitas Batanghari, h. 149.

[9] I.A Septyana Mega Putri dan Ni Nyoman Yuliarmi, "Beberapa Faktor yang memengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Bali", *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 2, No. 10, (Oktober, 2013) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, h. 433.

masyarakat dalam bekerja. Selain itu pula ada faktor penting yang sangat berperan dalam meningkatnya upah minimum yaitu karena kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, maka pemerintah mengambil kebijakan dalam peningkatan upah/gaji.[10]

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, salah satunya dengan penetapan upah minimum. Upah minimum setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan, tak terkecuali upah minimum di Provinsi Banten. Peningkatan upah minimum Provinsi Banten dapat dilihat dari grafik 3.1 di bawah ini:

Grafik 3.1

Grafik Upah Minimum (Rp) di Provisni Banten

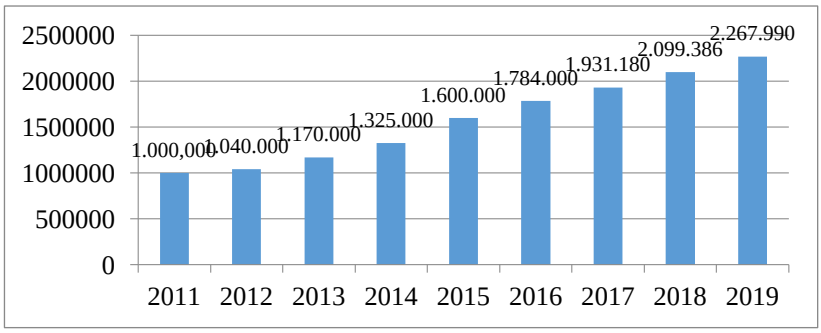

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten

[10] Indra Maipita, "Simulasi Dampak Kenaikan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pendapatan dan kemiskinan", *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan keuangan*, Vol.17, No.3, (September, 2013) Universitas Negeri Medan, h. 92.

Berdasarkan grafik 3.1 tersebut, terhitung dari tahun 2011, upah minimum Provinsi Banten sebesar Rp.1.000.000, kemudian upah minimum terus meningkat hingga tahun 2015 sebesar Rp.1.600.000, dan pada tahun 2019 upah minimum meningkat secara signifikan mencapai 2 Juta rupiah, yaitu sebesar Rp.2.267.990.

IPM dan upah minimum merupakan salah satu dari beberapa kebijakan pemerintah dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi Banten. Oleh karena itu, dari uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **"Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten".**

B. Identifikasi Masalah

1. Presentase penduduk miskin Provinsi Banten tahun 2011-2019 Fluktuatif
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Banten tahun 2011-2019 meningkat secara signifikan
3. Upah minimum Provinsi Banten tahun 2011-2019 meningkat secara signifikan

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dan meluas dari pokok bahasan, maka peneliti membatasi masalah dalam penelitian ini, yaitu pada Pengaruh IPM dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan di 4 Kabupaten dan 4 Kota di Provinsi Banten yang meliputi Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, dan Kota Tangerang Selatan periode tahun 2011-2019.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten Tahun 2011-2019?
2. Seberapa Besar Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten Tahun 2011-2019?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan upah minimum terhadap kemiskinan di Provinsi Banten tahun 2011-2019?
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan upah minimum terhadap kemiskinan di Provinsi Banten tahun 2011-2019?

F. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan bisa memberikan manfaat bagi pihak-pihak berikut:

1. Bagi Perguruan Tinggi

   Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan tambahan informasi bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti dengan judul serupa.
2. Bagi Pengambil kebijakan

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan tambahan ilmu pengetahuan khususnya mengenai IPM, upah minimum dan kemiskinan di Provinsi Banten.

G. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu digunakan untuk melihat gambaran mengenai hasil penelitian sebelumnya sebagai rujukan dalam melakukan penelitian selanjutnya. Selain itu juga untuk melihat persamaan dan perbedaan penelitian yang sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan saat ini:

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Nurul Fadillah, Sukiman dan	1. Variabel X (bebas) yaitu IPM 2. Variabel Y	1. Mempunyai empat variabel bebas 2. Variabel X	1. Secara parsial, IPM berpengaruh negatif dan

	Agustin Susyatna Dewi (2016)[11]	yaitu kemiskinan 3. Metode penelitian yaitu analisis regresi panel	yaitu pendapatan perkapita, tingkat pengangguran dan pertumbuhan penduduk 3. Lokasi penelitian yaitu di Jawa Tengah	signifkan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah
2.	Nadia Islami dan Ali Anis (2019)[12]	1. Variabel X (bebas) upah minimum 2. Variabel Y yaitu kemiskinan 3. Metode penelitian	1. Memiliki tiga variabel bebas 2. Variabel X pendidikan dan kesehatan	1. Secara parsial, upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan

[11] Nurul Fadillah, dkk., "Analisis Pengaruh Pendapatan Perkapita, Tingkat Pengangguran, IPM dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2009-2013", *Jurnal EKO-REGIONAL*, Vol. 11, No. 1, (Maret, 2016), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman, h. 18-26.

[12] Nadia Islami dan Ali Anis, "Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan di Indonesia", *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, Vol. 1, No. 3, (Agustus, 2019), Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, h. 939-948.

		menggunakan analisis regresi panel		di Indonesia 2. Secara simultan, upah minimum, pendidikan dan kesehatan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia
3.	Sudirman dan Lili Andriani (2017)[13]	1. Variabel X yaitu upah minimum 2. Variabel Y yaitu Jumlah penduduk miskin	1. Variabel X yaitu inflasi 2. Lokasi penelitian yaitu Provinsi Jambi 3. Metode penelitian yaitu analisis regresi linier berganda	1. Secara parsial, upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk

[13] Sudirman dan Lili Andriani, "Pengaruh Upah Minimum dan Inflasi Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jambi", *Jurnal of Economis and Business*, Vo. 1, No. 1, (September, 2017), Faklultas Ekonomi Universitas Batanghari, h. 148-159.

			4.Menggunakan data *time series*	miskin di Provinsi Jambi 2. Secara simultan, upah minimum dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Povinsi Jambi

H. Kerangka Pemikiran

Kemiskinan merupakan suatu keadaan yang sering dihubungkan dengan kebutuhan, kesulitan dan kekurangan di berbagai keadaan hidup. Menurut Rintuh (2003), kemiskinan dapat diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan meningkatkan kebutuhan konsumsi dasar dan kualitas hidupnya.

Kemiskinan sendiri merupakan masalah yang menyangkut banyak aspek karena berkaitan dengan pendapatan yang rendah, buta huruf, derajat kesehatan yang rendah dan ketidaksamaan derajat antar jenis kelamin serta buruknya lingkungan hidup.[14]

Indeks pembangunan manusia yang merupakan refleksi dari tingkat pembangunan kualitas manusia, memiliki peran yang sangat penting dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Pembangunan manusia seutuhnya baik dari aspek mental, fisik dan intelegensia merupakan modal dasar bagi suatu bangsa untuk lepas dari kemiskinan. IPM yang merupakan alat ukur bagi kualitas pembangunan manusia, menjadi variabel penting bagi suatu negara dalam mengentaskan kemiskinan.[15]

Selain itu juga, upah minimum dapat mempengaruhi jumlah penduduk miskin. Upah merupakan kompensasi yang diterima oleh satu unit kerja berupa jumlah uang yang dibayarkan. Upah tenaga kerja sangat penting untuk kedua belah pihak. Bagi pihak produsen, upah merupakan biaya produski yang harus ditekan seefisien mungkin. Bagi pihak pekerja upah merupakan sumber

---

[14] Syahrur Romi dan Etik Umiyati, *"Pengaruh Pertumbuhan…* h. 2.

[15] Yogi Citra Pratama, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Indonesia", *Jurnal Bisnis dan manajemen* Vol. 4, No. 2, (Agustus, 2014) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, h. 212.

penghasilan bagi dirinya, keluarganya dan menjadi sumber pembelanjaan masyarakat. Tinggi rendahnya upah merupakan faktor penting yang menentukan taraf hidup masyarakat.[16]

Penetapan upah minimum dapat meningkatkan pendapatan pekerja. dengan meningkatnya pendapatan, akan meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga masyarakat dapat memenuhi kebuthan hidup minimumnya. Dengan terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat, maka dapat menurunkan kemiskinan. Berikut merupakan gambaran dari kerangka penelitian ini:

Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran

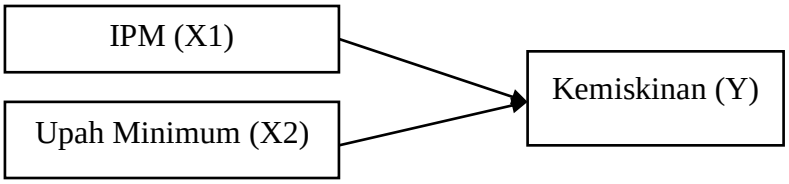

I. Sistematika Pemahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut:

---

[16] Jihad Lukis Panjawa dan Daryono Soebagiyo, "Efek Peningkatan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran", *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Vol. 15, No. 1, (April, 2014), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta, h. 49.

Bab I, pendahuluan. Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II, kajian pustaka. Bab ini membahas Teori yang berkaitan dengan Kemiskinan, IPM dan Upah Minimum, Hubungan Antar Variabel, dan Hipotesis.

Bab III, metode penelitian. Bab ini membahas Metode Penelitian yang berisi tentang Tempat dan Waktu Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Metode Analisis Data, dan Definisi Operasional Variabel Penelitian.

Bab IV, hasil penelitian. Bab ini menerangkan tentang Gambaran Umum Objek Penelitian, Deskripsi Data Penelitian, Hasil Analisis Data Penelitian dan Pembahasan Hasil Penelitian.

Bab V, kesimpulan dan saran. Bab ini menerangkan Kesimpulan dan Saran dari hasil penelitian yang dilakukan.